



# PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2025/Periodik - 2024)

## Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS MATARAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SATRIJO SALOKO

Jabatan : DEKAN FATEPA

3. NHK : **685189** 

#### II. DATA HARTA

| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 450.000.000 |
|-----------------------|-----|-------------|
|                       |     |             |

. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

## B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 141.000.000

 MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA VELOZ Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 16,000,000

| C. HARTA BERGERAK LAINNYA       | W. K.     | Rp                             |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------|
| D. SURAT BERHARGA               |           | Rp                             |
| E. KAS DAN SETARA KAS           | KPK KP    | Rp. 366.546. <mark>3</mark> 06 |
| F. HARTA LAINNYA                |           | Rp                             |
| Sub Total                       | 101-10    | Rp. 957.546.306                |
| HUTANG                          | lies lies | Rp                             |
| . TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | of .      | Rp. 957.546.306                |

### Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



